

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh peneliti terkait dengan topik yang akan diteliti. Supaya pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, maka penting untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini karena itulah maka peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut (Maharani et al., 2024) kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah situasi yang terjadi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya, yang dapat dilihat dalam beberapa indikator seperti rendahnya produktivitas, kemauan untuk maju yang rendah, dan terbatasnya modal, pendidikan, serta minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemiskinan memiliki sifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor tidak hanya oleh dipengaruhi oleh bidang ekonomi saja, akan tetapi dipengaruhi oleh bidang yang lainnya seperti politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Adawiyah, 2020). Berdasarkan penjelasan bahwasanya kemiskinan dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4

bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Syahri & Gustiara 2020):

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur berdasarkan ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minum untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan minum yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka, atau perhitungan per kepala, untuk dapat mengetahui seberapa banyak orang yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan absolut.

b) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan suatu konsep yang didasarkan pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang merupakan ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak merata.

c) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu konsep yang didasarkan pada sikap seseorang yang diakibatkan oleh faktor budaya, seperti malas tidak mau berusaha memperbaiki taraf kehidupan.

d) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan suatu konsep yang disebabkan oleh akses sumber daya. Kemiskinan ini terjadi akibat sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pemberantasan kemiskinan, akan tetapi malah memperburuk keadaan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut (Iskandar & Subekan 2016), menjelaskan bahwa penyebab dasar dari kemiskinan , yaitu kegagalan kepemilikan tanah dan modal, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, adanya perbedaan kesempatan di masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal di masyarakat, budaya hidup yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, tidak ada tata pemerintahan yang baik, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Menurut Kuncoro (2000) (D, Naukoko, & Mandeij 2022) penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Makro disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah, sedangkan jika secara mikro kemiskinan disebabkan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa faktor dari penyebab kemiskinan sangatlah kompleks dan saling mempengaruhi, maksudnya kemiskinan terjadi karena beberapa faktor bukan hanya disebabkan satu faktor saja.

2.1.1.3 Teori Kemiskinan: Teori Lingkaran Kemiskinan

Menurut Regnar Nurkse dalam (Chairunnisa & Qintharah, 2022) teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena produktivitas rendah, yang mengakibatkan penghasilan

penduduk rendah, dan hanya cukup memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung dimana tabungan merupakan sumber pembentukan modal masyarakat.

Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya kesehatan pada masyarakat akan menyebabkan rendahnya produktivitas karena tidak adanya kemampuan masyarakat untuk bekerja keras. Sehingga, dianggap bahwa semakin rendahnya kesehatan akan meningkatkan tingkat kemiskinan

2.1.2 Pengangguran

2.1.2.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2007) dalam (Nova Rianda, 2020) pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran memiliki prinsip mengandung arti hilangnya *output* (*Lost Output*) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (*Human Misery*), pengangguran juga menyebabkan pengeluaran pemerintah menjadi lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan.

Pengangguran dapat terjadi karena disebabkan oleh tidak seimbangnya pada pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang diminta (Sugianto & Permadhy, 2020). Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang merupakan penduduk dengan usia kerja (berusia 15 tahun lebih) sedang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (1994) dalam (Simbala et al., 2024a) pengangguran dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya, berikut merupakan penjelasan dari keduanya:

1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya
 - a) Pengangguran normal atau friksional

Pengangguran normal atau friksional merupakan pengangguran yang terjadi akibat adanya keinginan dari seseorang dalam mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

b) Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang ditimbulkan oleh penurunan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau menutup perusahaan dan akan mengakibatkan penambahan pengangguran.

c) Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan pada struktur ekonomi yang menyebabkan penurunan pada industri dan perusahaan. Penurunan tersebut akan membuat kegiatan produksi dalam industri menjadi menurun, dan sebagian pekerja terpaksa akan diberhentikan dan menjadi pengangguran.

d) Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia yang digantikan oleh mesin dan bahan kimia.

2. Pengangguran berdasarkan cirinya

a) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka diakibatkan oleh rendahnya lowongan pekerjaan daripada penambahan tenaga kerja. Akibat dari keadaan tersebut menyebabkan dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi pengangguran yang terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat menjalankan kegiatan dengan efisien.

c) Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim terjadi pada setiap adanya pergantian musim. Pengangguran ini terjadi utamanya pada sektor pertanian dan perikanan. Contohnya, jika terjadi musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa untuk menganggur.

d) Setengah Menganggur

Setengah menganggur merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat dari seseorang melakukan migrasi dari desa ke kota, karena tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Maka dari itu dapat membuat orang tersebut menjadi pengangguran sepenuh waktu. Terdapat juga yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja yang jauh lebih rendah dari pekerjaan normal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu termasuk ke dalam setengah menganggur.

2.1.2.3 Faktor-faktor Penyebab terjadi Pengangguran

Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemakmuran masyarakat. Apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan maka pendapatan masyarakat akan dapat dicapai secara maksimum. Pengangguran dapat berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Pengangguran dapat

menyebabkan berbagai macam masalah ekonomi dan sosial. Jika keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan dapat menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Septianingrum & Iskandar, 2021).

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Budihardjo et al., (2020), indeks pembangunan manusia adalah indeks yang menghitung pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara dengan mengkombinasikan tiga faktor pencapaian yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan. Kemudian menurut Anfasa, (2021), salah satu faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara adalah modal manusia.

Teori modal manusia diperkenalkan oleh Shultz dalam Pratiwi, (2019), menjelaskan bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang sama seperti halnya mesin dan teknologi. Ia juga menekankan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan bentuk modal manusia yang sama seperti modal fisik yang dapat menghasilkan pengembalian (*return*) di masa depan. Selain menekankan tentang hal tersebut, Schultz juga menegaskan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan serta keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Tentu investasi dalam modal sosial juga mendatangkan imbalan (penghasilan) di masa mendatang sama seperti investasi dalam modal fisik (L. N. I. Sari & Warsitasari, 2023).

Menurut Todaro dalam Pratiwi, (2019), melalui bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan investasi modal manusia. Kedua bidang ini memainkan peranan yang amat penting, pendidikan dapat menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi yang modern dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kesehatan merupakan hal penting dalam peningkatan produktivitas. Dapat disimpulkan pendidikan dan kesehatan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input dari fungsi produksi agregat.

Menurut Mukaromah et al., (2023) sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibuat dengan tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup usia masyarakat yang panjang beserta tingkat kesehatan, taraf pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Penelitian ini akan menerapkan metode baru dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Metode baru ini dianggap lebih superior dibandingkan dengan metode sebelumnya, terutama karena penggunaan indikator yang lebih tepat dan

diskriminatif. Indikator Angka Melek Huruf dalam perhitungan indeks pendidikan dinilai tidak lagi relevan; oleh karena itu, metode baru ini menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, yang lebih mampu mencerminkan kondisi pendidikan yang aktual. Selain itu, metode baru ini menggantikan penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), yang lebih representatif dalam menggambarkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah.

Indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mencapai pembangunan SDM yang baik, ketiga dimensi harus memiliki perhatian yang sama besar karena dinilai sama pentingnya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Saputra, 2011), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- IPM lebih dari 80,0 dikategorikan tinggi
- IPM antara 66,0-79,9 dikategorikan menengah atas
- IPM antara 50,0-65,9 dikategorikan menengah bawah
- IPM kurang dari 50,0 dikategorikan rendah

Apabila di suatu wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi maka mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat dalam proses memperoleh pendapatan, mengakses hasil pembangunan, kesehatan, pendidikan serta berbagai aspek dasar

dalam kehidupan lainnya dinilai lebih baik dari pada wilayah yang memiliki IPM yang rendah.

2.1.4 Upah Minimum

Upah minimum merupakan standar minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Marpaung, et al, 2019).

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Sedangkan upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum sendiri memiliki tujuan agar kualitas penduduk yang berpendapatan rendah menjadi lebih baik. Adanya peningkatan upah minimum akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan pun meningkat (Kalsum & Faisal Fadli, 2024).

Menurut Faadihilah & Wiwin Priana Primadha, (2023), dalam teori yang dikemukakan oleh golongan klasik baru yang berpendapat bahwa upah nominal akan selalu berubah sejalan dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut golongan Keynes baru, upah dalam pasar ditentukan melalui perjanjian kontrak antara pekerja dan majikan atau perusahaan, dan tidak akan

dipengaruhi oleh fluktuasi dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan kata lain, upah cenderung tetap pada tingkat yang telah disepakati dalam kontrak antara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Penurunan permintaan tenaga kerja tidak akan menyebabkan penurunan upah nominal, dan sebaliknya, peningkatan permintaan tenaga kerja tidak akan segera meningkatkan upah nominal.

Selama kontrak kerja antara tenaga kerja dan majikan tetap berlaku, upah akan tetap konstan, meskipun tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar (Sadono, 2012). Upah memiliki dua perspektif yang berbeda, Dari sudut pandang produsen, upah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan merupakan bagian dari biaya total produksi. Namun, dari sudut pandang pekerja, upah dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan tenaganya oleh produsen.

Selanjutnya, menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam Normalitasari, (2012), upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Menurut Prawira, (2018), berpendapat bahwa upah adalah cerminan pendapatan dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.

Dari definisi–definisi diatas meskipun berbeda–beda artinya tetapi jelas memiliki maksud yang sama maka dapat disimpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak. Yang dimaksud adil adalah bahwa besarnya upah harus dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan–pekerjaan. Dengan kata lain pekerjaan–pekerjaan sejenis memperoleh bayaran yang sama. Sedangkan yang dimaksud layak adalah bahwa besarnya upah yang diberikan pada karyawan harus sama dengan pembayaran yang diterima karyawan yang serupa di perusahaan lain.

Dari pengertian diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Ada dua pihak yang mempunyai dan berkewajiban yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan saling menentukan yang satu dengan yang lainnya.
- 2) Pihak pekerja yang memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan perintah yang diberikan oleh pengusaha/ organisasi serta berhak untuk mendapatkan upah atau kompensasi.
- 3) Pihak pengusaha / organisasi memikul kewajiban untuk memberikan upah atau ganjaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja.
- 4) Selanjutnya hak dan kewajiban ini timbul pada saat adanya hubungan kerja.

Teori Upah-efisiensi (*eficiency wage*) menurut (Mankiw. G. N, 2007) menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat membuat pekerja akan lebih produktif.

Perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun surplus tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi upah semakin besar juga kerugian bagi pekerja, karena perusahaan beroperasi lebih efisien membayar pekerjanya dengan upah yang lebih tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan.

Menurut (Mankiw. G. N, 2007) menjelaskan bagaimana upah dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, antara lain:

1. Pekerja yang dibayar berdasarkan upah yang memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, sehingga menghasilkan pekerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Teori ini berlaku di negara-negara yang masih miskin dan berkembang.
2. Teori yang relevan bagi negara-negara maju, menyatakan bahwa upah yang tinggi akan menurunkan keluar masuknya karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, maka semakin besar insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tertentu. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan akan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru.
3. Kualitas rata-rata dari tenaga kerja bergantung pada upah yang dibayarkan perusahaan pada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya maka pekerja terbaik akan mengambil pekerja di tempat lain, meninggalkan

perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif.

4. Upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, atau mereka dapat memilih untuk bermalas-malasan dengan resiko tertangkap basah dan dipecat.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Upah

Menurut Asyhadie, (2007), terdapat beberapa jenis upah yaitu sebagai berikut:

- a. Upah Nominal, merupakan upah yang diterima oleh para pekerja secara tunai yang berhak diterima sebagai imbalan atas jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah Nyata, merupakan kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.
- c. Upah Hidup, merupakan upah yang diterima oleh para pekerja yang relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain.
- d. Upah Minimum, merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan upah para pekerja yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan setiap tahun oleh pemerintah.

- e. Upah Wajar, merupakan upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya terhadap perusahaan.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan upah tenaga kerja diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan, yang dapat dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun apabila jam kerja melebihi ketentuan waktu kerja maka waktu kerja tersebut bisa dianggap masuk sebagai waktu lembur sehingga tenaga kerja atau buruh berhak atas upah lembur.

b) Lama Kerja

Lama kerja atau curahan jam kerja tenaga kerja ini dapat diukur dari pencurahan waktu yang dilakukan oleh seseorang untuk bekerja dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Para tenaga kerja menerima balasan berupa upah yang telah ditentukan perusahaan, namun biasanya upah dapat meningkat dipengaruhi dari lama kerja seseorang yang bersifat continue dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini upah seseorang dapat meningkat apabila tenaga kerja tersebut menjadi pegawai tetap dan dalam jangka waktu yang panjang.

c) Tingkat Pendidikan

Pendidikan jika dilihat secara umum bertujuan mengembangkan dan memperluas pengetahuan, pengalaman serta pengertian individu, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar terencana

dengan tujuan agar dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, kecerdasan, kepribadian, memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negaranya.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Akbar et al., 2022) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Perjalanan dari waktu ke waktu, diharapkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Menurut Surya (2005:5) dalam (Ningsih & Andiny, 2018) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) atau PDRB tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat dari PDB. PDB digunakan sebagai alat untuk menilai/mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memperluas atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara ada empat faktor, yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia, SDM merupakan faktor untuk pembangunan ekonomi. Angkatan kerja membutuhkan keterampilan, manajemen, dan keahlian dalam memproduksi untuk menciptakan barang yang berkualitas.
- 2) Sumber Daya Alam, SDA yang melimpah dapat digunakan secara bijak untuk membantu mempercepat proses pembangunan.
- 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di era global pada saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi disebabkan karena adanya cara baru atau cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan seperti, cara menanam padi, membuat baju, atau membangun rumah.
- 4) Pembentukan Modal, untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu menyerap tenaga kerja, apabila tenaga kerja terserap akan meningkatkan pendapatan untuk kemajuan perekonomian negara.

2.1.5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang diciptakan oleh Adam Smith dijelaskan dalam karya yang diterbitkan oleh David Ricardo dan Karlmax pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 oleh Milton Friedman. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkembang apabila jumlah penduduk bertambah, maka akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi atau konsumen yang akan membantu meningkatkan produktivitas. Sistem produksi

meliputi sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan output, sumber daya manusia yang dijadikan sebagai tenaga kerja terdidik yang terampil untuk meningkatkan produktivitas, memperbanyak stok modal untuk penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output total, dan memajukan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Soeharjoto, 2018).

Kemudian Teori Mankiw, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan efektif menurunkan kemiskinan jika diiringi dengan penanaman modal pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pengembangan usaha di wilayah-wilayah miskin. Jika investasi hanya terkonsentrasi pada sektor yang tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah, maka pertumbuhan ekonomi justru akan memperburuk ketimpangan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian (Soekapdjo & Oktavia, 2021) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap	Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Variabel Upah Minimum Provinsi dan Variabel Pengangguran.	Variabel Inflasi, dan Variabel LPE.	Variabel IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Sedangkan Variabel UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2, No. 1, April 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengangguran Di Indonesia”				
2	Penelitian dari (Mahesa <i>et al.</i> , 2024) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020”	Variabel IPM, Variabel Kemiskinan, dan Variabel Pengangguran	Variabel LPE, dan UMP.	Variabel IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020.	Jurnal Manajemen dan Sains, Oktober 2022, ISSN 2541-6243.
3	Penelitian dari (Miftah <i>et al.</i> , 2025) dengan judul ”Analisis Pengaruh Variabel Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh”	Variabel IPM, Variabel UMP, dan Kemiskinan	Variabel LPE, Variabel PDRB Perkapita, dan Variabel Pengangguran.	Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sedangkan Variabel IPM berpengaruh Positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 23, No.2, Feb 2023
4.	Penelitian dari (Gifelem <i>et al.</i> , 2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Sorong”	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Variabel Pengangguran, Variabel Inflasi, Variabel UMP dan IPM.	Variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Sorong.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 23, No.1, Jan 2023
5.	Penelitian dari (Rizki <i>et al.</i> , 2025) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten / Kota Provinsi Nusa”	Variabel Upah Minimum, Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran.	Variabel IPM, dan Kemiskinan.	Variabel Upah Minimum, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di kab/kota Provinsi Nusa. Sedangkan Variabel pertumbuhan ekonomi, memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran di kab/kota Provinsi Nusa.	Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Vol.1, No.4, Okt 2022, e-ISSN: 2962-0823, p: ISSN: 2964-5328, Hal. 21-30.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Penelitian dari (Syaifullah & Malik, 2017) dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN)”	Variabel IPM, PDB, dan Kemiskinan	Variabel Upah Minimum Provinsi, dan Pengangguran	Variabel PDB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di ASEAN-4. Sedangkan Variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di ASEAN-4	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol. 1, Jilid 1, 2017, Hal 107-119.
7.	Penelitian dari (Hasibuan, 2023) dengan judul “Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia”	Variabel IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	Variabel Inflasi dan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Melalui pengangguran, IPM dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kata	Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.8, No. 1, Mei 2023.
8.	Penelitian dari (Sulistiawan, 2023) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Bruto, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa”	Variabel Upah Minimum, PDRB, Pengangguran, dan Kemiskinan	Variabel IPM	Variabel Upah Minimum dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. Sedangkan Variabel Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol.7, No.1, Feb 2023, pp: 115-126.
9.	Penelitian dari (Herawati <i>et al.</i> , 2023), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	Variabel Upah Minimum, dan IPM	Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat	Jurnal Ekonomi Integra, Vol.13, No.1, Jan, 2023, ISSN: 0216-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2021”				4337, e-ISSN: 2581-0340, Hal 173-181.
10.	Penelitian dari (Anggraini <i>et al.</i> , 2023) dengan judul “Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”	Variabel Pengangguran dan Kemiskinan	Variabel IPM, UMP, dan LPE.	Variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam.	Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Vol.2, September 2021
11.	Penelitian dari (Mauladi <i>et al.</i> , 2023) dkk dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021”	Variabel Upah Minimum Provinsi, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan	Variabel Inflasi dan Belanja Modal	Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Sedangkan Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021.	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2023, p-ISSN: 2354-7057, e-ISSN: 2442-3076.
12	Penelitian dari (Hanifah & Hanifa, 2021) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan”	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Upah Minimum Provinsi, dan Variabel Kemiskinan.	Variabel IPM, dan Variabel LPE.	Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan Variabel Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan..	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.2, No.5 (2021)
13.	Penelitian dari (Mahendra & Juandi, 2024) dengan judul “Dampak Tingkat Pengangguran,	Variabel IPM, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Kemiskinan	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Variabel IPM dan Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Sedangkan Variabel Upah Minimum	<i>Bulletin of Economic Studies</i> (BEST), Vol.4, No. 1, (2024), pp, 58-72.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kesempatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, terhadap Kemiskinan di Kota Makassar”			provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Makasar.	
14.	Penelitian dari (Dewi, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional, PDRB, dan Nilai Tukar terhadap Pengangguran di Indonesia pada Periode 2003-2014”	Variabel PDRB dan TPT	Variabel Kemiskinan, IPM, Upah Minimum Regional, dan Nilai Tukar	Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	Jurnal Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2018
15.	Penelitian dari (Palette <i>et al.</i> , 2024) dengan judul “ <i>The Influence of Human Development Index (HDI) and Population on Unemployment Rate in Toraja Regency</i> ”	Variabel IPM dan Pengangguran	Variabel Kemiskinan, LPE, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk	Variabel IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Taroja Utara	<i>Formosa Journal of Applied Sciences</i> (FJAS), Vol.3, No.9, 2024: 3687-3700
16.	Penelitian dari (Eko <i>et al.</i> , 2022) dengan judul “ <i>Minimum Wages, Economic Growth and Human Development Index on Unemployment in East Java</i> ”	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengangguran	Variabel Kemiskinan, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur	<i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal</i> (BIRCI-Journal), Vol. 5, N0.3, August 2022, Page 19149-19157, e-ISSN: 2615-3076, p-ISSN: 2615-1715
17.	Penelitian dari (Rokhim, 2023) dengan judul “ <i>Factors Influencing</i>	Variabel PDRB, Upah Minimum, dan Tingkat	Variabel Kemiskinan, dan Investasi	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh negatif	<i>Journal of Scientitic Research, Education, and</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Unemployment in Indonesia</i>	Pengangguran Terbuka		dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia	<i>Technology (JSRET)</i> , Vol.2, No.1, March 2023, E-ISSN: 2962-6110, P-ISSN: 2964-7843
18.	Penelitian dari (Tara <i>et al.</i>) dengan judul “ <i>The Influence of Economic Growth, Human Development Index, and Open Unemployment Rates on Poverty in Sumatra</i> ”	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan	Variabel Inflasi, IPM, dan Upah Minimum Provinsi	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatra, sedangkan Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatra.	Bengkulu <i>International Conference on Economics, Management, Business and Accounting</i>

Sumber: Data diolah 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, atau yang dikenal sebagai *framework*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatur ide, informasi, atau konsep-konsep dalam urutan yang logis. Tujuannya adalah membantu seseorang memahami, menyusun, dan menyampaikan informasi dengan lebih teratur dan jelas. Kerangka pemikiran menjadi dasar untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono, (2022), kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori-teori berhubungan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka ini disusun berdasarkan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini menguji enam variabel yang telah dipilih sebagai berikut.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pengangguran

Menurut penelitian (Soekapdjo & Oktavia, 2021) indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Melalui meningkatnya pembangunan modal manusia dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dengan pengangguran di Indonesia. Menurut penelitian Marlina, (2022), peningkatan ipm yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, mencerminkan peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga individu lebih kompetitif di pasar kerja. Menurut Baihawati & Sebayang, (2023), ipm yang rendah sering kali berkorelasi dengan tingginya tingkat pengangguran, karena individu dengan keterampilan yang kurang memadai kesulitan mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, meningkatkan ipm sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Pengangguran

Menurut (Marcell E R Sinaga & Noni Rozaini, 2023) upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dimana kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan pengangguran di objek studi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara upah minimum provinsi (UMP) dengan pengangguran di Indonesia. Menurut (Hidayah & Aji, 2022) Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat meningkat, yang artinya kenaikan upah minimum akan menaikkan pula daya beli masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan, yang kemudian akan memotivasi bisnis untuk mempekerjakan lebih banyak staf untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun kenaikan upah biasanya dikaitkan dengan risiko peningkatan pengangguran, dalam situasi pandemi, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan membantu perusahaan tetap bertahan dan mempertahankan pekerjaanya. Kemudian pandangan (V. B. P. Sembiring & Sasongko, 2019) menyatakan bahwa Kenaikan UMP mendorong tenaga kerja lebih termotivasi mencari pekerjaan, karena upah yang ditawarkan lebih layak. Di sisi lain, perusahaan di Pulau Jawa mungkin tidak langsung mengurangi jumlah pekerja, melainkan mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebagai respons atas kenaikan upah. Dalam beberapa kasus, kenaikan UMP juga dianggap sebagai strategi meningkatkan kinerja karyawan dan mendukung pencapaian target kerja, bukan sebagai beban biaya.

2.2.3 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Pengangguran

Menurut penelitian Baihawafi & Sebayang, (2023), laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka roda-roda ekonomi yang menggerakkannya juga semakin mengambang, output yang dihasilkan semakin

bertambah. Peran tenaga kerja semakin dibutuhkan dan jumlahnya juga semakin bertambah yang berarti jumlah pengangguran akan berkurang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Menurut Ahmad Sahlan Hadi & Riani, (2022), ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini disertai dengan peningkatan investasi dan ekspansi bisnis, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun menurut Lidiya Rima Ranti et al., (2024), saat pertumbuhan ekonomi melambat, perusahaan cenderung mengurangi produksi dan menunda perekrutan, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang kuat berpotensi mengurangi tingkat pengangguran, sementara pertumbuhan yang lemah dapat memperburuk masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan

Menurut (Ari Kristin Prasetyoningrum, 2018) IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Di mana semakin tinggi IPM suatu daerah, maka tingkat kemiskinannya cenderung menurun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. IPM sendiri merupakan indikator yang mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan (yang diukur melalui harapan hidup saat lahir),

pendidikan (meliputi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (dilihat dari pengeluaran per kapita atau pendapatan). Ketika suatu daerah mengalami peningkatan IPM, artinya masyarakat di daerah tersebut memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kondisi ini memungkinkan individu untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya, yang pada akhirnya akan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, secara statistik dan empiris, hubungan antara IPM dan kemiskinan cenderung bersifat negatif dan signifikan, yang berarti bahwa peningkatan IPM secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Oleh karena itu IPM memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Menurut (Mukhtar et al., 2019) di mana bahwa adanya ketimpangan dalam peningkatan IPM di seluruh wilayah Indonesia, selain itu faktor kesadaran yang masih rendah di Indonesia baik itu dari orang tua atau anak itu sendiri. Misalkan saja anak seorang buruh petani yang lebih memilih bekerja seperti orang tuanya sejak dia kecil dibandingkan menuntut ilmu di sekolah. Hal tersebut diperkuat oleh (Azriyansyah, 2022) yang dimana bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

2.2.5 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kemiskinan

Menurut (Saman Fajriansyah, 2022) UMP memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Secara teori, Upah Minimum Provinsi (UMP) juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. UMP merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan standar minimum upah yang harus

dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Ketika UMP meningkat, pendapatan riil para pekerja formal cenderung ikut meningkat, sehingga daya beli masyarakat pun naik. Peningkatan daya beli ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara lebih layak, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Dengan kata lain, kenaikan UMP dapat memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bergantung pada upah minimum sebagai sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, secara empiris, peningkatan UMP berpotensi memberikan efek penurunan terhadap kemiskinan dan hubungan ini bersifat negatif serta signifikan. Artinya, semakin tinggi UMP yang ditetapkan dan diimplementasikan secara efektif, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Oleh karena itu UMP Memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Putri & Hutabarat, 2024) dan (Diylna Rahmawati & Dr. Asnita Frida Sebayang, 2023) yang mengatakan bahwa UMP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

2.2.6 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Kemiskinan

Menurut (Nansadiqa, 2024) LPE memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Secara teori, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. LPE mencerminkan tingkat peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Ketika LPE meningkat, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas

ekonomi daerah tersebut berkembang, yang biasanya disertai dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, secara konseptual dan empiris, pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan cenderung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan ini bersifat negatif dan signifikan, artinya semakin tinggi LPE suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi, asalkan pertumbuhan tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat bawah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu LPE memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nora Herlina et al., 2022) yang menyatakan dalam temuannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan investasi industri pengolahan padat karya di Indonesia walaupun tidak mendominasi tetapi mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini karena peningkatan kesejahteraan melalui daya beli atau kemampuan konsumsi masyarakat yang meningkat, sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2.7 Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Terdapat hubungan positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak bekerja sama sekali (Aini & Islamy, 2021). Ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan akibat pengangguran menyebabkan semakin banyak masyarakat terjebak dalam kondisi tanpa pendapatan, termasuk mereka yang bekerja paruh waktu atau dalam pekerjaan yang tidak stabil, yang juga rentan terhadap kemiskinan. Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran meningkatkan kemungkinan individu terjebak dalam kemiskinan, dan jika tingkat pengangguran di suatu negara sangat tinggi, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, seperti kekacauan politik dan sosial. Kondisi ini berimplikasi pada kesejahteraan penduduk serta prospek pembangunan ekonomi jangka panjang yang juga terpengaruh secara negatif (Adam et al., 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawan, (2023), menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung peningkatan pengangguran bisa meningkatkan tingkat kemiskinan. Sudah rahasia umum bahwa pengangguran memang sangat bisa memicu meningkatnya angka kemiskinan karena sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya adalah dari penghasilan dan apabila masyarakat tersebut tidak mempunyai pekerjaan maka masyarakat tersebut akan menjadi beban daerahnya dan negaranya.

2.2.8 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran

Menurut Arsyad, (2010), salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Menurut Ardian et al., (2021), bahwa jika suatu daerah mempunyai nilai IPM yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga harus tinggi, atau nilai IPM yang tinggi akan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan melalui pengangguran. Beberapa penelitian yang selaras yaitu Yanti, (2024), menunjukkan bahwa penelitian indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kemudian didukung oleh penelitian Juniati et al., (2023), yang menunjukkan bahwa indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat Kemiskinan melalui tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Soekapdjo & Oktavia, (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat; peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan dan

kesehatan, yang keduanya memainkan peran krusial dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengadopsi teknologi modern dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, masyarakat memiliki potensi untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara keseluruhan.

2.2.9 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran

Menurut (Simbala *et al.*, 2024b), upah minimum berfungsi sebagai salah satu indikator penting dalam mengatasi tingkat pengangguran. Penerapan upah yang tepat dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mengatasi masalah pengangguran di masyarakat. Namun, jika upah ditetapkan terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah pekerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka kemiskinan. Kenaikan upah yang signifikan sering kali mencerminkan biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga perusahaan mungkin akan mengurangi kapasitas produksinya. Akibatnya, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara upah minimum provinsi dengan kemiskinan melalui pengangguran. Hal ini didukung oleh penelitian Indarwati & Woyanti, (2023), upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah dapat mendorong tenaga kerja untuk menerima pekerjaan lebih cepat, mengurangi

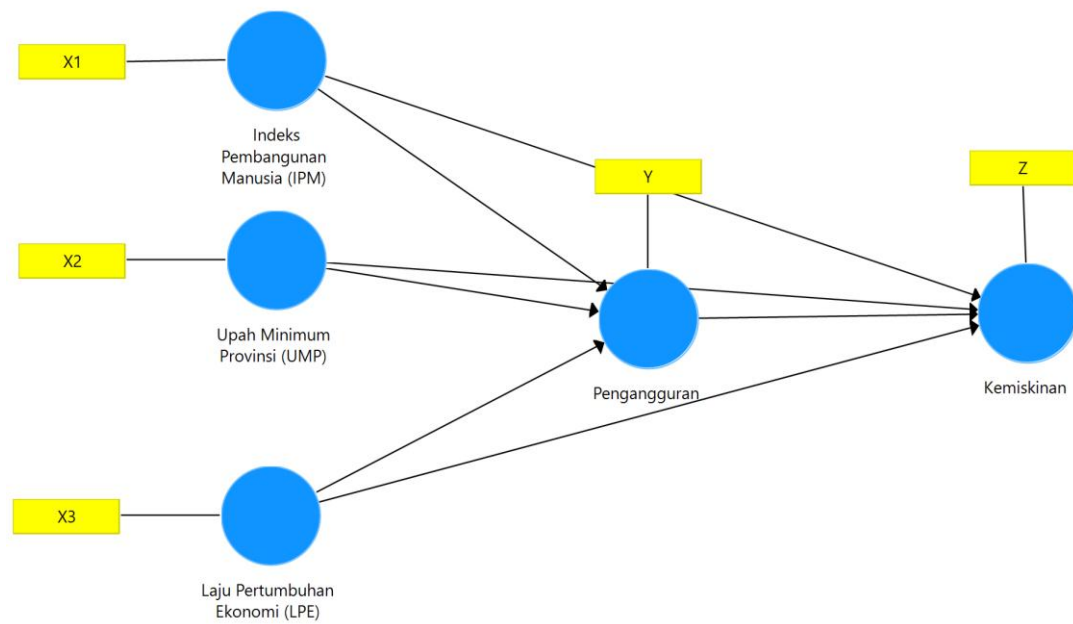
pengangguran, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan upah yang tepat dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan melalui pengurangan pengangguran.

2.2.10 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran

Menurut Iqbal Salsabil & Westi Rianti, (2023), laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sangat penting dalam analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang berpotensi mengurangi tingkat pengangguran. Ketika lebih banyak individu mendapatkan pekerjaan, pendapatan rumah tangga meningkat, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar juga bertambah, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan melalui pengangguran, namun pernyataan ini apabila sama persis belum ditemukan namun ada penelitian yang mirip atau hampir sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian dari Suropto, (2020), pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan Kemudian didukung juga oleh penelitian Baihawafi & Sebayang, (2023), menunjukkan bahwa laju Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan pengangguran. Apabila laju pertumbuhan ekonomi tinggi maka angka pengangguran dapat dipastikan akan berkurang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini untuk memudahkan dan memperjelas kegiatan penelitian, maka secara skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel *intervening* di Indonesia. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Diduga indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.

2. Diduga upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.
3. Diduga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berpengaruh negatif terhadap pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.
4. Diduga indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2000-2023.
5. Diduga upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2000-2023.
6. Diduga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2000-2023.
7. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2000-2023.
8. Diduga indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.
9. Diduga upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.
10. Diduga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran Indonesia tahun 2000-2023.